**PERAN PETINGGI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KAMPUNG MUARA MUJAN KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT**

**ALDI ANDHIKA RADYA**

Dra. Hj. Nanik Pujiastuti, M.Si dan Salasiah, S.Sos, M.Si

1Administrasi Negara, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

2Dosen Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75124, Indonesia.

**ABSTRAK**

 **ALDI ANDHIKA RADYA**, **NPM 15.11.1001.3509.036***.* **JUDUL SKRIPSI PERAN PETINGGI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KAMPUNG MUARA MUJAN KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan gotong royong Di Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.

Metode yang digunakan adalah deskriptif dan penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian *deskriftif kualitatif* dimana penelitian ini terbatas pada pengungkapan fenomena atau masalah yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Subyek dalam penelitian ini adalah merupakan kepala desa, petinggi dan masyarakat, untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, sedangkan teknik penunjangnya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, bahwa peranan petinggi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan pembangunan yaitu sangat berperan karena dalam perencanaan, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembangunan petinggi sangat memaksimalkan perannya serta partisipasi masyarakat pada kegiatan pembangunan yaitu dituntut untuk berpartisipasi, maka diperlukan tentang kebersamaan, keperdulian serta kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi pada kegiatan tersebut.

Kata kunci : peran petinggi, partisipasi masyarakat.

1. **PENDAHULUAN**

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah , lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara ), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan ”. Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan , lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (peraturan )

Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering merupakan salah satu kampung yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terpadu dan diarahkan agar berdaya upaya disetiap dan diseluruh kawasan serta tingkatan administrasi daerah. Pelaksanaan pembangunan selalu membutuhkan partisipasi dari semua pihak baik dari pemerintah itu sendiri maupun masyarakat atau pihak-pihak lain yang terkait. Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan tersebut, dituntut suattu keadaan lingkungan yang kondusif agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan kebutuhannya.

Pemberlakuan UU. No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan daerah dan memuat tentang pelimpahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom dimana daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, semakin menambah peranan pemerintah daerah didalam pembangunan.

Pembangunan yang dilaksanakan harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, dimana sebagai pelaku utama dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana saling mengisi, saling menunjang, serta saling melengkapi. Peranan pemerintah di daerah sangat dominan didalam pembangunan nasional karena fungsi dari pemerintah itu sendiri adalah sebagai koordinator dan pengayom rakyat. Dalam hal sebagai koordinator masyarakat dalam mengisi pembangunan, maka diperlukan sebuah komunikasi antara pemerinatah dengan masyarakat.

Pada era demokratisasi sebagaimana tengah berjalan di negeri ini, masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif mayarakat dan bebas dari kepentingan individu dan golongan.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upayamempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek diluar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Jadi desa sebagai salah satu entitas pemerintahan paling rendah menjadi arena paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kbutuhan kolektif masyarakat. Melihat urusan pemerintahan yang dapat dikelola oleh desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat memiliki kewenangan dan legitimasi yang cukup kuat untuk membawa desa tersebut ke arah yang dikehendakinya. Dimana pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Kepala desa atau petinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, kepala desa mempunyai wewenang antara lain membina kehidupan masyarakat desa dan juga mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif jadi peran kepala desa bagi masyarakatnya tidaklah kecil apalagi dihubungkan dengan perannya sebagai penyelenggara urusan kemasyarakatan. Penyelenggaraan urusan kemasyarakatan tidak akan berhasil baik jika hanya satu pihak saja yang berperan aktif sehingga dituntut peran srta masyarakat dalam bentuk partisipasi. Partisipasi ini berupatindakan-tindakan dari masyarakat untuk mengambil peran serta dan terlibat langsung didalam pelaksanaan pembangunan desa.

Di desa atau kampung lambing ada berbagai kegiatan kemasyarakatan anatara lain di bidang lingkungan seperti kerja bakti dan gotong royong, dibidang keamanan lingkungan seperti siskamling, di bidang kebudayaan seperti penyelenggaraan upacara adat dan kesenian daerah. Namun dalam realisasinya kegiatan-kegiatan tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh masyarakat dengan berbagai kendala-kendala sehingga menjadi rahasia umum masyarakat kurang berpartisipasi. Jadi ingin melihat keterkaitan antara peran kepala desa atau petinggi kampung dengan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.

1. **RUMUSAN MASALAH**

“Bagaimanakah Peran Petinggi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat”.

1. **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu Tinjauan Tentang peran Petinggi Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering, maka penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian *deskriftif kualitatif* dimana penelitian ini terbatas pada usaha pengungkapanfenomena atau masalah yang ada di lapangan sebagaimana adanya.

Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive. Teknik purposive yaitu pemilihan subjek penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sanapiah Faisal dalam Purnamasari, 2012:47).

Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti yaitu orang-orang yan mengetahui , berpengalaman, dan dapat memberikan informasi tentang Peran Petinggi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, sehingga dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka indikator-indikator:

1. Figur Petinggi atau Kepala Kampung.
2. Pembinaan Kehidupan Masyarakat Kampung.
3. Koordinasi Keterlibatan masyarakat dalam Kegiatan Kemasyarakatan.
4. Keaktifan atau Tingkat Partisipasi Masyarakat.
5. Evaluasi dari kegiatan Kemasyarakatan yang Telah Dilakukan.
6. Merasakan Hasil dan Manfaat Kegiatan Kemasyarakatan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis induktif. Analisis induktif adalah analisis yang bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum. Kesimpulan umum itu bisa berupa kategorisasi maupun proposisi (Burhan Bungin, 2001: 209). Adapun langkahlangkah yang dilakukan untuk manganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data
	1. Unitasi dan Kategorisasi

3. Display Data

1. Penarikan Kesimpulan

**IV.PEMBAHASAN**

**4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Berikut ini penulis akan menyajikan semua data baik mengenai peran kepala desa atau petinggi maupun partisipasi masyarakat dalam hal kegiatan kemasyarakatan di Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering yang penulis peroleh dari hasil penelitian lapangan baik melalui observasi maupun wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus Kampung maupun para narasumber yang lainnya telah diperoleh data-data yang akan penulis sajikan dibawah ini.

**4.2. Hasil Penelitian**

**1. Figur Petinggi atau Kepala Kampung**

Figur atau sosok Petinggi merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan tolak ukur tingkat kemajuan suatu kampung, karena figur inilah yang mencerminkan kepribadian seorang pemimpin dalam membawa diri dan melaksanakan tugas serta kewajibannya. Jadi hasil wawancara berikut ini akan diketahui bahwa figur atau sosok petinggi berpengaruh terhadap kemajuan suatu kampung

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 10 Januari 2019 menurut :

**Bapak Tawau** selaku Petinggi atau Kepala Kampung Muara MujanKecamatan Tering, mengatakan :

“Bagi saya sebagai pemimpin Kampung Muara Mujan, sosok seorang Petinggi di dalam sebuah kampung sangat penting sekali hampir semua urusan maupun masalah yang ada hubungannya dengan administrasi kampung pasti melewati pemerintah kampung yang dipimpin oleh petinggi. Petinggi memiliki kuasa dalam menggerakkan masyarakatnya untuk terlibat dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti bergotong royong, menjaga keamanan kampung, ikut ambil bagian dalam acara adat seperti *beliant, paremp api, kuangkay, nalint taun*, maupun acara kesenian daerah *bergantar, berijok*”.

1. **Pembinaan Kehidupan Masyarakat Kampung**

Pembinaan kehidupan masyarakat kampung sangatlah penting karena akan meningkatkan keterlibatan langsung dari warga dalam setiap kegiatan atau prgram kerja yang digalakkan oleh pemerintah kampung.

Mengenai pembinaan kehidupan masyarakat kampung dapat diketahui dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 10 Januari 2019 menurut **Bapak Willy** selaku masyarakat Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering,mengatakan :

“Jadi di kampung Muara Majan Kecamatan Tering mempunyai program kerja yang pelaksanaannya terdiri dari berbagai kegiatan, akan tetapi program kerja ini kami sesuaikan dengan kebutuhan/permintaan dari warga. Dan yang lebih penting dengan ketersediaan dana dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan juga dana comdev dari perusahaan tambang batu baru. Artinya ada beberapa program kerja kami tidak mempunyai waktu yang tidak tetap, seperti misalnya program kerja mingguan, bulanan, atau pun tahunan. Walaupun kegiatan kami tidak terprogram dengan baik,

1. **Koordinasi Keterlibatan masyarakat dalam Kegiatan Kemasyarakatan** Kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik

jika ada pengaturan dan pembagian tugas serta penyampaian informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 10 Januari 2019 di rumah **Bapak Dekky** selaku masyarakat Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering, mengatakan :

“Biasanya jika ada rencana mengadakan suatu kegiatan yang melibatkan orang banyak, sebelumnya kami mengadakan pertemuan dibalai pertemuan umum kampung. Kami yang saya maksud disini adalah saya sendiri, sekdes, para staf kampung, dan ketua-ketua RT. Kami membahas hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, jika perlu panitian acara maka akan ada pemilihan unsur kepanitiaan. Lalu hasil dari pertemuan ini akan disampaikan kepada masyarakat baik itu secara lisan maupun melalui pengumuman yang biasa

ditempelkan di tempat-tempat yang mudah terlihat dan sering dilalui orang”.

**.** **Keaktifan atau Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Demi kelancaran kegiatan tersebut diharapkan partisipasi dari warga berupa biaya dan atau tenaga. Mengenai keaktifan masyarakat dalam memberikan sumbangan baik biaya maupun tenaga dapat diketahui dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 10 Februari 2019 di rumah **Bapak Fajar** selaku masyarakat Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering, mengatakan :

“Sangat baik. Memang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan pihak pemerintah kampung tidak mungkin menanggung seluruh biaya kegiatan itu, pihak pemerintah kampung hanya bisa menanggung seperlunya. Untuk itu diperlukan juga bantuan dana sumbangan dari masyarakat, dan mengenai besarnya sumbangan itu tergantung dari kesepkatan bersama antar warga dan juga pemerintah kampung. Kalau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan itu cukup baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga yang ikut dalam kegiatan tersebut”.

**5.** **Evaluasi dari Kegiatan Kemasyarakatan yang Telah Dilakukan**

Kegiatan kemasyarakatan yang telah dilakukan akan dievaluasi, apakah kegiatan itu telah berjalan dengan baik atau tidak dan apakah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk mengetahui keaktifan warga dalam mengevaluasi hasil kegiatan kemasyarakatan yang telah dilakukan dapat dilihat dari petikan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 10 Februari 2010 di rumah **Ibu** **Krawing** selaku masyarakat Kampung Muara Majan Kecamatan Tering,mengatakan :

“Oh tentu saja, setiap kegaiatan yang sudah dilakukan, warga pasti akan menilai apakah kegiatan itu sudah berjalan dengan baik apa tidak, dan bila tidak berjalan dengan baik warga akan mengadakan pertemuan-pertemuan atau musyawarah guna mencari solusinya bersama-sama”.

Dari wawancara diketahui bahwa warga aktif dalam mengevaluasi maupun mengawasi jalannya kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan. Dan mengenai jalannya kegiatan tersebut, petinggi menilai bahwa kegiatan itu telah berjalan dengan baik. Hal ini diketahui dari wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 10 Februari 2019 di rumah **Ibu Krawing** selaku masyarakat Kepala Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering, mengatakan :

“Tanggapan saya, kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik dan akan terus ditingkatkan frekuensinya sehingga dapat menjadi agenda tetap,, karena hal itu dapat mempererat tali komunikasi antara pemerintah kampung dengan warga masyarakat”.

**4.3. Pembahasan**

Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan dari penelitian berdasarkan analisis data yang dilakukan, untuk selanjutnya diikuti dengan pembahasan dalam setiap indikator.

**1. Figur Petinggi atau Kepala Kampung**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petinggi Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering dan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa figur seorang kepala desa atau petinggi memegang peranan yang penting karena petinggi adalah pemimpin kampung, pengambil inisiatif, dan penggerak roda pemerintahan kampung.

Akan tetapi petinggi tidak bisa bekerja sendirian sehingga bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain atau organisasi-organisasi lain, seperti lembaga adat, badan perwakilan kampung, karang taruna, lembaga

keagamaan, serta darma wanita. Dalam menjalankan roda pemerintahan kampung seorang petinggi harus membawa perubahan dan kemajuan yang positif serta tidak otoriter dan tidak terlibat praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

**2. Pembinaan Kehidupan Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petinggi Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering dan Sekretaris Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering dapat diketahui bahwa pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan, ada yang terprogram dan ada juga yang tidak terprogram namun berdasarkan kebutuhan warga dan ketersediaan dana.

1. **Koordinasi Keterlibatan masyarakat dalam Kegiatan Kemasyarakatan** Berdasarkan hasil wawancara dengan Petinggi Kampung Muara Majan

Kecamatan Tering dan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa upaya-upaya pemerintah kampung dalam mengkoordinir masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dilakukan dengan mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh unsur-unsur dari pemerintah kampung dan para kepala RT. Dalam musyawarah ini akan dibahas persiapan-persiapan dan pembentukan panitia, lalu ada penyampaian informasi kepada masyarakat tentang hasil dari musyawarah tersebut. Akan tetapi masih ada beberapa kendala antara lain alam pertemuan tersebut tidak melibatkan Badan Perwakilan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.

**4. Keaktifan atau Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petinggi Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan tenaga maupun biaya relatif baik.

1. **Evaluasi dari Kegiatan Kemasyarakatan yang Telah Dilakukan** Berdasarkan hasil wawancara dengan Petinggi Kampung Muara Mujan

Kecamatan Tering dan narasumber lainnya dapat diketahui bahwa masyarakat aktif dalam mengevaluasi maupun mengawasi jalannya kegiatan kemasyarakatan sehingga dapat mempererat tali komunikasi antara pihak pemerintah kampung dengan warga masyarakat. Namun dari kegiatan-kegiatan yang berbentuk bangunan fisik yang sumber pendanaannya dari Alokasi Dana Kampung dan Comdev dipandang kurang transparan.

**6. Merasakan Hasil dan Manfaat Kegiatan Kemasyarakatan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petinggi Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering dapat diketahui bahwa masyarakat dapat merasakan hasil dan manfaat dari kegiatan kemasyarakatan yang telah terealis

**V.PENUTUP**

**5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, terutama pada penyajian data dan analisis data, maka berikut ni penulis memberikan kesimpulan ׃

1. Figur atau sosok petinggi atau kepala kampung memegang peranan yang penting bagi masyarakat Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering karena petinggi adalah pemimpin kampung, pengambil inisiatif, dan penggerak roda pemerintahan kampung.
2. Petinggi atau Kepala Kampung melaksanakan program kerja dalam rangka membina kehidupan masyarakat berdasrkan usulan dari masyarakatnya dan disesuaikan dengan ketersediaan dana kampung.
3. Hail musyawarah yang diadakan oleh pemerintah kampung dengan melibatkan ketua-ketua RT bertujuan mengatur persiapan-persiapan dan pembagian tugas sehingga lebih mudah mengkoordinir masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.
4. Tingkat partisipasi masyarakat sudah cukup baik, khusunya dalam menyumbangkan tenaga dan dana serta ikut mengawasi jalannya kegiatan kemasyarakatan.
5. Masyarakat dapat merasakan hasil dan manfaat dari kegiatan kemasyarakatan yang telah direalisasikan.

**5.2. Saran**

Adapun saran-saran yang penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut ׃

1. Dalam merencanakan setiap kegiatan kemasyarakatan seaiknya Petinggi atau Kepala Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering selalu melibatkan dan berkoordinasi dengan Lembaga-Lembaga lain seperti Badan Perwakilan Kampung, Lembaga Adat, Karang Taruna, Lembaga Keagamaan, dan Darma Wanita.
2. Sebaiknya melaksankan tugas dan kewajibannya, Petinggi atau Kepala Kampung Lambing harus memiliki program kerja yang tersusun dan terencana dengan baik sehingga memiliki kegiatan-kegiatan yang jelas dan berjalan secara berkelanjutan.
3. Sebaiknya Petinggi atau Kepala Kampung Muara Majan Kecamatan Tering lebih transparan melaporkan penggunaan dana dalam mendirikan bangunan fisik sehingga masyarakat bisa tahu secara pasti dan tidak memiliki prasangka yang buruk terhadap pemerintahan kampung.

 **DAFTAR PUSTAKA**

Anonim. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang otonomi daerah.* Sinar Grafika Offset. Jakarta.

\_\_\_\_\_\_. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.

\_\_\_\_\_\_. 2005. *Peraturan Daerah Kabupaten Kutai barat Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Kampung*. Perkumpulan Bina benua Puti Jaji. Samarinda.

Bryant, Coralie dan Louis G. White. 2012. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta : LP3ES.

Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita

Koentjaraningrat.2005. Pengantar Antropologi II Pokok – Pokok Etnografi, Jakarta: Rineka Cipta,

Keramba Jaring Apung untuk Mengurangi Potensi Eutrofikasi di Waduk Wadaslintang. Jurnal Limnotek (2010) 17 (2) : 191-200.

Loekman Soetrisno,2004 Masyarakat Irian Tak Pernah Tahu Tiwul. Dalam http://tempo.co.id.

Made Pidarta dalam A. D., Siti Irene. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).

Moniqu Sumampouw, 2004. “Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif.” Jacub Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita. 91-117.

H.A.R Tilaar (2009). Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta.

Isbandi Rukminto, Adi. 2007. Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan. Depok: FISIP UI Press.

Sastropoetro, Santoso. R.A. 20058. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung : Alumni.

.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Widi Astuti. 2008. Penggunaan Pakan Fermentasi pada Budidaya Ikan Sistem 59

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winardi, J. (2), 2005, Manajemen Perubahan (The Management of Change), Cetakan Ke-1, Jakarta, Prenada Media.

-----------------

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan P emerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014